

Collaborative Governance Dinas Perhubungan Kota Palembang: Penerapan dan Penegakkan Retribusi

M. Wicky Dwi Nando¹, Rika Apriliani², Siti Zubaidah³

^{1,2,3}STIA Bala Putra Dewa, Palembang, Indonesia. (email: muhammadwicky2000@gmail.com)

Abstrak

Perhubungan Kota Palembang melalui pendekatan Collaborative Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan penegakkan retribusi di Kota Palembang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antara pihak-pihak tersebut tercermin dalam koordinasi dan komunikasi yang efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Collaborative Governance mampu meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakkan retribusi, namun membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Kata kunci:

kolaboratif pemerintahan; kota Palembang; dinas perhubungan; retribusi

Pendahuluan

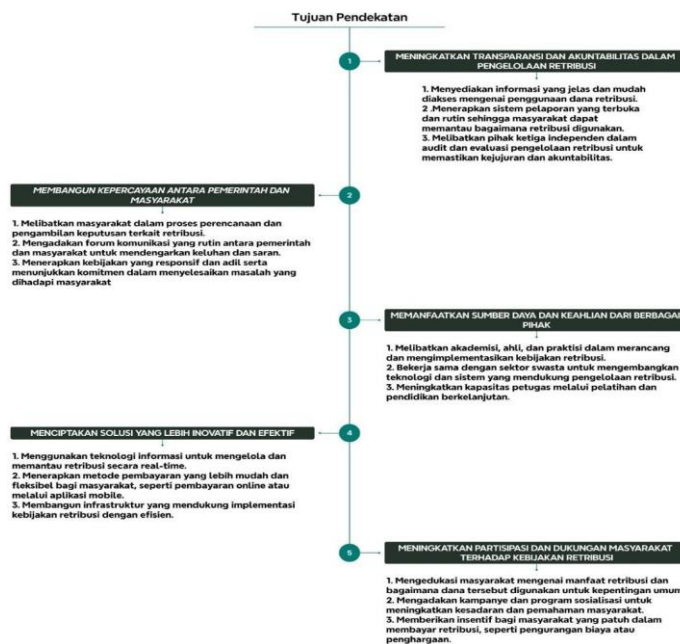
Kota Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan ini adalah penerapan dan penegakan retribusi (Meads et al., 2017), yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perhubungan Kota Palembang. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan tradisional yang bersifat top-down (Gugu & Dal Molin, 2016) dan terpusat pada pemerintah seringkali menghadapi berbagai kendala (Keyim, 2018). Banyak permasalahan yang ada berhubungan kapasitas dengan sistem layanan untuk beradaptasi dan memanfaatkan pengetahuan (Li et al., 2018).

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan dan penegakan retribusi daerah, seperti masyarakat seringkali menolak kebijakan retribusi karena dianggap sebagai beban tambahan. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat retribusi bagi peningkatan pelayanan publik juga dapat menyebabkan resistensi ini, pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan aturan menyebabkan kebijakan retribusi sulit dijalankan secara efektif (Li et al., 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya petugas pengawas, minimnya teknologi pendukung, dan

ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar, sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas dapat menghambat implementasi kebijakan retribusi (Sandover, 2020). Misalnya, kurangnya tenaga ahli, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya anggaran untuk mendukung operasional kebijakan tersebut, masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya retribusi dalam mendukung pelayanan publik (Widianingsih et al., 2021). Edukasi yang kurang mengenai bagaimana retribusi digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat, dan implementasi kebijakan retribusi seringkali memerlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal, misalnya, kurangnya sinkronisasi data, ketidaksepeahaman mengenai prosedur, dan lambatnya respon dalam menyelesaikan masalah yang muncul (M. Wang & Peng, 2023).

Dalam mendukung pelayanan publik yang terukur, transparan, dan akuntabel, penerapan administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting (Situmeang, 2024). Administrasi sebagai fungsi manajemen birokrasi memicu keseriusan dan ketepatan dalam bekerja (Cabral & Krane, 2018), sehingga dinas perhubungan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efisien (Ran & Qi, 2018). SOP membantu memastikan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik secara konsisten dan efisien (Hafer, 2018).

Collaborative Governance melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini bertujuan untuk:



Dalam konteks Kota Palembang, penerapan Collaborative Governance oleh Dishub dalam hal retribusi merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada (Quayle et al., 2019). Ini melibatkan pergeseran dari model pemerintahan tradisional ke pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kemitraan (Clarke, 2017). Inisiatif ini juga sejalan dengan tren global menuju tata kelola perkotaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan (Meijer & Bolívar, 2016). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dishub Kota Palembang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan retribusi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Steels, 2015; van der Heijden, 2015).

Namun, implementasi Collaborative Governance bukanlah tanpa tantangan. Diperlukan perubahan mindset (Cheng et al., 2015), peningkatan kapasitas kelembagaan (Kim & Siddiki, 2018), dan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat (Getha-Taylor et al., 2019). Keberhasilan pendekatan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Dishub Kota Palembang untuk membangun dan memelihara hubungan yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan (Berends et al., 2016). Selain itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk mengatasi hambatan koordinasi antar lembaga dan mengintegrasikan berbagai perspektif guna menciptakan solusi yang efisien (Galloway et al., 2013).

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah (Amoah et al., 2023). Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Rum, 2018) seperti, Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat (Massam, 2002). Contohnya retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (Osborne et al., 2013). Retribusi Jasa Usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta (Klievink et al., 2016). Contohnya seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pasar grosir dan pertokoan, serta retribusi pemakaian aset daerah (Abbiasov & Sedov, 2023) dan Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan (Heinze, 2001), pengaturan (Whitelaw et al., 2001), pengendalian (Dougherty, 1995), dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam (Venables, 2016), atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum (Cordes, 1999). Contohnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan (Rosa- Jiménez et al., 2017).

Tujuan retribusi meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan (Type & Milner, 2024) dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, retribusi berfungsi untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah (Aas et al., 2018). Dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang memanfaatkan layanan atau fasilitas tertentu (Benjamin et al., n.d.), pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk membiayai kegiatan operasional (J. Wang et al., 2021) dan pembangunan daerah (Gennaioli et al., 2011). Hal ini mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat (Xu et al., 2016) dan mendorong kemandirian finansial daerah (Kuroda & Kawai, 2003). Kedua, retribusi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan public (Perry, 2020). Dana yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, peningkatan berbagai layanan dan fasilitas publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Colgrove, 2010). Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik dan memadai. Ketiga, retribusi berperan dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat (Aiken et al., 2011). Melalui retribusi perizinan tertentu, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak merugikan kepentingan umum, dan teratur dengan baik (Hamiltont, 1972). Hal ini juga mencakup pengendalian penggunaan sumber daya, alam, pemanfaatan ruang, dan kegiatan usaha (Holling and Meffe.Pdf, 2005). Keempat, retribusi membantu mencapai keadilan social (Bradley, 2004). Dengan membebankan biaya layanan publik kepada mereka yang secara langsung memanfaatkannya, retribusi memastikan bahwa beban biaya tersebut didistribusikan secara adil. Ini berarti bahwa masyarakat yang lebih banyak menggunakan atau memperoleh manfaat dari layanan publik turut berkontribusi lebih besar dalam pembiayaannya (Prihasta & Suswanta, 2020).

Metode

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa (Dale et al., 2012), pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Guariso et al., 2023). Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kolaborasi antar pihak yang terlibat serta tantangan dan solusi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan penegakkan retribusi di Kota Palembang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Start implementation at the Palembang City Transportation Department

Di era modern ini, Collaborative Governance di Dinas Perhubungan Kota Palembang memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menghasilkan sistem yang lebih efektif dan responsif dalam pengelolaan sektor perhubungan, termasuk dalam penerapan dan penegakan retribusi. Collaborative Governance atau Tata Kelola Kolaboratif adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, dan menegakkan aturan. Dinas Perhubungan Kota Palembang memulai inisiatif dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya retribusi melalui berbagai kampanye informasi, untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembayaran retribusi. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan solusi digital seperti aplikasi pembayaran dan sistem pemantauan, yang mempermudah proses retribusi dan meningkatkan transparansi.

Dinas Perhubungan menyusun dan menerapkan peraturan mengenai tarif, prosedur pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran, untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan retribusi. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, mereka juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem. Dana yang diperoleh dari retribusi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur transportasi, yang secara langsung meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

2. Implementation and Enforcement of the Palembang City Levy

Penegakan retribusi yang efektif sangat bergantung pada konsistensi dalam penerapan sanksi, transparansi dalam proses penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan. Adanya sanksi bagi pelanggar yang berfungsi untuk mencegah atau menghalangi tindakan yang tidak diinginkan melalui ancaman dan penerapan hukum. Masih ada tantangan dalam konsistensi penegakan, terutama dalam hal pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran kecil. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pelanggar mendapatkan sanksi yang sesuai, tanpa diskriminasi. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks Dinas Perhubungan Kota Palembang, penerapan retribusi adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjamin keberlanjutan layanan transportasi dan infrastruktur publik. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan efektivitas kolaborasi:

1. Semua pihak yang terlibat memiliki visi dan misi yang sama dalam meningkatkan layanan transportasi dan mengoptimalkan penerimaan retribusi.
2. Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.
3. Menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas mengenai retribusi, termasuk tarif, prosedur pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran.
4. Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses retribusi dan penggunaan dana yang terkumpul, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

3. Evaluation of Implementation and Enforcement of Levies

Penerapan dan penegakan retribusi di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Collaborative governance, yang melibatkan berbagai pihak, merupakan kunci dalam menciptakan sistem yang transparan, adil, dan efektif. Konsep ini mengacu pada kerjasama erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan, perancangan kebijakan, dan pelaksanaan program-program publik. Dalam konteks retribusi, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pemungutan dan penggunaan dana serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya.

Sebagian besar responden merasa bahwa sanksi yang diterapkan sudah cukup adil, namun ada saran untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan masih dianggap kurang optimal, meskipun Dinas Perhubungan telah berusaha melibatkan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan retribusi perlu ditingkatkan agar mendapatkan masukan yang lebih beragam. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dianggap baik, tetapi masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat memberikan masukan berharga, memperkuat sistem, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Evaluasi rutin terhadap efektivitas penegakan retribusi diperlukan untuk menilai tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan retribusi.

Penegakan retribusi dianggap cukup efektif, dengan sanksi bagi pelanggar berfungsi untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan melalui ancaman dan penerapan hukum. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penegakan, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran kecil. Sebagian besar responden menilai sanksi yang diberikan cukup adil, tetapi ada saran untuk meningkatkan transparansi dalam proses penegakan

hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan masih dianggap kurang optimal, meskipun Dinas Perhubungan telah berusaha melibatkan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam pembuatan kebijakan retribusi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan masukan yang lebih beragam. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dinilai baik, namun masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan retribusi.

Kesimpulan

Collaborative Governance di Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan bagaimana kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pihak terkait di Kota Palembang dalam penerapan dan penegakkan retribusi oleh Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem retribusi. Melalui mekanisme collaborative governance, Dinas Perhubungan mampu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pendapatan daerah dari retribusi. Namun, tantangan seperti koordinasi antar lembaga, transparansi, dan akuntabilitas perlu terus diatasi untuk memperkuat implementasi dan penegakan kebijakan retribusi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Aas, E., Email, S., Revenues, C. R., Residency, S., Year, F., Revenue, O., Regions, C., Residency, S., Revenue, O., Regions, C., Residency, S., Regional, C., Revenue, O., Revenue, O., Regions, C., Residency, S., District, O., Revenue, C., Residency, S., & National, B. (2018). Improving Regional Original Income with Tax Receipt, Regional Retribution And. 2018(3), 11–26.
- Abbiasov, T., & Sedov, D. (2023). Do local businesses benefit from sports facilities? The case of major league sports stadiums and arenas. *Regional Science and Urban Economics*, 98, 1–59. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2022.103853>
- Aiken, M., Cairns, B., & Taylor, M. (2011). Community organisations controlling assets: a better understanding. June.
- Amoah, A., Kwablah, E., Amoah, B., & Adjei-Mantey, K. (2023). Willingness to pay for electronic transaction levy: empirical evidence from Ghana. *African Journal of Economic and Management Studies*, 14(4), 663–679. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-09-2022-0359>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Benjamin, L., Rubin, J. S., & Zielenbach, S. (n.d.). Community Development Financial Institutions: Current Issues and Future Prospects. 26(2), 177–195.
- Berends, L., Ritter, A., & Chalmers, J. (2016). Collaborative Governance in the Reform of Western Australia's Alcohol and Other Drug Sector. *Australian Journal of Public Administration*, 75(2), 137–148. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12154>
- Bradley, G. V. (2004). Retribution: The Central Aim of Punishment. 19.
- Cabral, S., & Krane, D. (2018). Civic festivals and collaborative governance. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 185–205. <https://doi.org/10.1177/0020852315615196>
- Cheng, A. S., Gerlak, A. K., Dale, L., & Mattor, K. (2015). Examining the adaptability of collaborative governance associated with publicly managed ecosystems over time: Insights from the front range roundtable, Colorado, USA. *Ecology and Society*, 20(1). <https://doi.org/10.5751/ES-07187-200135>
- Clarke, S. E. (2017). Local Place-Based Collaborative Governance: Comparing State-Centric and Society-Centered Models. *Urban Affairs Review*, 53(3), 578–602. <https://doi.org/10.1177/1078087416637126>
- Colgrove, J. (2010). Schools of Public Health: Essential Infrastructure of a Responsible Society and a 21st-Century Health System. 125(February), 8–14.
- Cordes, M. W. (1999). Property Rights and Land Use Controls: Balancing Private and Public Interest. 19(3).
- Dale, A., Wathan, J., & Higgins, V. (2012). Secondary Analysis of Quantitative Data Sources. In *The SAGE Handbook of Social Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781446212165.n31>
- Dougherty, T. (1995). Systems and Control. In *Systems and Control*. <https://doi.org/10.1142/2830>
- Galloway, T., Cole, M., & Lewis, C. (2013). ORE Open Research Exeter. *Journal of Cleaner Production*, 0–48.
- Gennaioli, N., Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., Ciarcia, N., Coleman, N., Jaffe, S., Kosenko, K., Queiro, F., Santoni, N., Becker, G., Bloom, N., Carvalho, V., Glaeser, E., Gopinath, G., Gottlieb, J., Helpman, E., Hsieh, C.-T., Kahn, M., ... Weil, D. (2011). NBER WORKING PAPER SERIES HUMAN CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT Human Capital and Regional Development.

- Getha-Taylor, H., Grayer, M. J., Kempf, R. J., & O'Leary, R. (2019). Collaborating in the Absence of Trust? What Collaborative Governance Theory and Practice Can Learn From the Literatures of Conflict Resolution, Psychology, and Law. *American Review of Public Administration*, 49(1), 51–64. <https://doi.org/10.1177/0275074018773089>
- Guariso, D., Castañeda, G., & Guerrero, O. A. (2023). Budgeting for SDGs: Quantitative methods to assess the potential impacts of public expenditure. *Development Engineering*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.deveng.2023.100113>
- Gugu, S., & Dal Molin, M. (2016). Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in Italy. *Administration & Society*, 48(2), 237–262. <https://doi.org/10.1177/0095399715581037>
- Hafer, J. A. (2018). Understanding the Emergence and Persistence of Mandated Collaboration: A Policy Feedback Perspective of the United States's Model to Address Homelessness. *American Review of Public Administration*, 48(7), 777–788. <https://doi.org/10.1177/0275074017729877>
- Hamilton, R. W. (1972). Procedures for the Adoption of Rules of General Applicability: The Need for Procedural Innovation in Administrative Rulemaking *. 553(1970), 1276–1338.
- Heinze, B. (2001). Financial Instruments for Nature Conservation in Central and Eastern Europe. May, 1–231. *Holling and Meffe.pdf*. (n.d.).
- Ii, S. S., Fitzgerald, L., Morys-Carter, M. M., Davie, N. L., & Barker, R. (2018). Knowledge translation in tri-sectoral collaborations: An exploration of perceptions of academia, industry and healthcare collaborations in innovation adoption. *Health Policy*, 122(2), 175–183. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.11.010>
- Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonisahti. *Journal of Travel Research*, 57(4), 483–494. <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Kim, J., & Siddiki, S. (2018). Linking diversity of collaborative policymaking venues with procedural justice perceptions: A study of U.S. marine aquaculture partnerships. *American Review of Public Administration*, 48(2), 159–174. <https://doi.org/10.1177/0275074016669442>
- Klievink, B., Bharosa, N., & Tan, Y. H. (2016). The collaborative realization of public values and business goals: Governance and infrastructure of public-private information platforms. *Government Information Quarterly*, 33(1), 67–79. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.12.002>
- Kuroda, H., & Kawai, M. (2003). Strengthening regional financial cooperation in East Asia. *Financial*

- Governance in East Asia: Policy Dialogue, Surveillance and Cooperation, June 2003, 134–164.
<https://doi.org/10.4324/9780203356418>
- Li, S., Xia, Y., Xiao, R., & Jiang, H. (2022). Residents' Behavioral Intention of Environmental Governance and Its Influencing Factors: Based on a Multidimensional Willingness Measure Perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph192214734>
- Massam, B. H. (2002). Quality of life: Public planning and private living. *Progress in Planning*, 58(3), 141–227. [https://doi.org/10.1016/S0305-9006\(02\)00023-5](https://doi.org/10.1016/S0305-9006(02)00023-5)
- Meads, G., Russell, G., & Lees, A. (2017). Community governance in primary health care: towards an international Ideal Type. *International Journal of Health Planning and Management*, 32(4), 554–574. <https://doi.org/10.1002/hpm.2360>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Perry, J. L. (2020). Bases of The Motivational Public Service. July 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00466.x>
- Prihata, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(2012), 221. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p10>
- Quayle, A., Grosvold, J., & Chapple, L. (2019). New modes of managing grand challenges: Cross-sector collaboration and the refugee crisis of the Asia Pacific. *Australian Journal of Management*, 44(4), 665–686. <https://doi.org/10.1177/0312896219872234>
- Ran, B., & Qi, H. (2018). Contingencies of Power Sharing in Collaborative Governance. *American Review of Public Administration*, 48(8), 836–851. <https://doi.org/10.1177/0275074017745355>
- Rosa-Jiménez, C., Nebot, N., García Moreno, A., & Ballesteros, M. J. M. (2017). Near Zero Consumption Building as an Urban Acupuncture for a Vertical Slum. A Case Study in the City of Malaga, Spain. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 245(5). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/245/5/052028>
- Rum, M. (2018). Conversion of Federal Tax Collection to Local Government. *International Research Journal of Finance and ...*, February, 14–22.

- Sandover, R. (2020). Participatory food cities: Scholar activism and the co-production of food knowledge. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/SU12093548>
- Situmeang, M. (2024). Focus Ilmu Administrasi Pengaruh Administrasi dan Standar Operasional Prosedur terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan The Influence of Administration and Standard Operating Procedures on Public Services at the South Ta. 3, 39–51.
- Steels, S. (2015). Key characteristics of age-friendly cities and communities: A review. *Cities*, 47, 45– 52. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.02.004>
- Type, I., & Milner, B. (2024). Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries.
- van der Heijden, J. (2015). Interacting State and Non-State Actors in Hybrid Settings of Public Service Delivery. *Administration and Society*, 47(2), 99–121. <https://doi.org/10.1177/0095399713481349>
- Venables, A. J. (2016). Using natural resources for development: Why has it proven so difficult? *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 161–184. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.161>
- Wang, J., Zhao, L., & Huchzermeier, A. (2021). Operations-Finance Interface in Risk Management: Research Evolution and Opportunities. *Production and Operations Management*, 30(2), 355– 389. <https://doi.org/10.1111/poms.13269>
- Wang, M., & Peng, X. (2023). How to Develop Sustainably after Poverty Alleviation in Poverty-Stricken Areas under Paired Assistance: A Quantitative Assessment Framework Based on System Dynamics Model. *Sustainability*, 15(6), 4764. <https://doi.org/10.3390/su15064764>
- Whitelaw, S., Baxendale, A., Bryce, C., MacHardy, L., Young, I., & Witney, E. (2001). “Settings” based health promotion: A review. *Health Promotion International*, 16(4), 339–353. <https://doi.org/10.1093/heapro/16.4.339>
- Widianingsih, I., Paskarina, C., Riswanda, R., & Putera, P. B. (2021). Evolutionary Study of Watershed Governance Research: A Bibliometric Analysis. *Science and Technology Libraries*, 40(4), 416–434. <https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.1926401>
- Xu, Z., Wu, Z., Li, Z., Jee, K., Rhee, J., Xiao, X., Xu, F., Wang, H., & Jiang, G. (2016). High fidelity data reduction for big data security dependency analyses. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*, 24-28-October-2016, 504–516. <https://doi.org/10.1145/2976749.29783>